

IMPLEMENTASI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO KABUPATEN SIDOARJO (Studi Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo)

Oleh :

Mochammad Alfin Azrial A
(202020100074)

Dosen Pembimbing : Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP., M.AP

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Pendahuluan

Informasi dan Komunikasi Publik

Perkembangan pembangunan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya tidak hanya untuk aktivitas layanan atau pengelolaan informasi, tetapi juga untuk memengaruhi kebutuhan dalam mengembangkan teknologi informasi serta penunjangannya, seperti perangkat lunak jaringan. Dengan demikian informasi dan komunikasi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan warga negara, karena informasi dan komunikasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari.



UU No. 39 Tahun 2008

Kapabilitas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mutlak bagi lembaga pemerintah yang dimandati oleh undang-undang terlebih UU No. 39 Tahun 2008 untuk secara khusus membidangi urusan informasi dan komunikasi yakni kementerian komunikasi dan informatika. Di tingkat daerah maka pelaksanaan di ranah tersebut menjadi ranah dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota. Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota bertugas membantu bupati atau wali kota untuk menyampaikan informasi ke masyarakat dan menjalin komunikasi publik. Pada hal ini, bupati sidoarjo dibantu oleh dinas komunikasi dan informatika atau DISKOMINFO kabupaten sidoarjo.

Permasalahan Program Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum berjalan secara maksimal karena kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten sidoarjo.

Program Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Pada akhir tahun 2021, DISKOMINFO Sidoarjo menerbitkan laporan rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 beberapa program informasi dan komunikasi publik telah dipetakan oleh DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo. Rencana yang mencangkup lima tahun program strategis DISKOMINFO Sidoarjo. Renstra tersebut membahas hal-hal substantive seperti isu, kebijakan, program hingga kinerja.

GAP PERMASALAHAN

Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo

terbatasnya anggaran dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi

terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia di bidang IT.

PENELITIAN TERDAHULU

- Nicolin Manoppo (2022)

“Implementasi Program Cerdas Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado”.

Hasil dari penelitian ini dinilai masih belum cukup baik, Adapun kendala yang ditemukan adalah minimnya infrastruktur TIK dan juga kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni didalam bidang TIK.

- Kevin Maluwu (2021)

“Implementasi Program Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika”.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *smart city* masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang mencukupi baik di lingkungan pemerintah ataupun individu yang ahli didalam bidang IT.

METODE



Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif



Teknik Analisis Data

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data
- Penyajian Data
- Penarikan Kesimpulan



Fokus Penelitian

Seberapa efektif menjalankan program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dengan teori Implementasi menurut George C Edwards III (1980) :

- 1) Komunikasi (Communication),
- 2) Sumber Daya (Resource),
- 3) Disposisi (Disposition),
- 4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Struktur).

METODE



Lokasi penelitian
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data
wawancara, observasi, dan
dokumentasi



Sumber Data
Data primer dan data
sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Komunikasi

Dalam indikator komunikasi menjelaskan bahwa kegiatan atau rangkaian hingga informasi kebijakan mampu mengetahui apa yang perlu dipersiapkan serta disampaikan untuk mencapai misi yang telah direncanakan hingga tepat sasaran. Komunikasi memastikan apakah target implementasi dapat tercapai. Sehingga komunikasi ini membawa dampak penting bagi tercapainya sebuah implementasi program. Menurut Edward III, kebijakan publik hendaknya dilakukan dengan efektif antara penyelenggara kebijakan maupun rancangan dan pelaksana kepentingan. Dengan komunikasi, misi dan tujuan kebijakan dapat tersosialisasi dengan baik.

Komunikasi dalam implementasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi informasi yang memadai, sosialisasi dan kepentingan. Agar kemudian implementasi menjadi efektif, maka mereka yang menanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah program mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi tertutup sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Masyarakat akan semakin cerdas melihat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berdampak langsung kepadanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi penyelenggara pemerintahan untuk ikut mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Namun disayangkan, pada Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, keterbukaan informasi masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Karena banyak informasi yang harus diakses harus melalui internet, dan seperti kita ketahui di Kabupaten Sidoarjo belum semua daerah sepenuhnya dapat menjangkau internet dengan jaringan yang maksimal. Ditambah lagi rata-rata pengguna internet didominasi oleh kalangan anak muda.

Penyampaian informasi mengenai suatu kegiatan akan lebih efektif apabila dilakukan secara langsung, baik dengan mengundang masyarakat dalam rapat ataupun dengan pemberitahuan ke tempat tinggal masyarakat. Disini peneliti melihat kurangnya sosialisasi secara langsung oleh Kominfo kepada masyarakat, tentang keberadaan informasi-informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan lain-lain. Karena juga banyak masyarakat yang belum tau apa sebenarnya fungsi dan tugas dari Kominfo. Tetapi menurut hasil wawancara bahwa rapat-rapat mengenai kegiatan pemerintahan hanya mengundang orang-orang dari kalangan tertentu, sehingga tidak mewakili masyarakat yang terdampak secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Sumber Daya

Masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan program, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Menurut informasi yang diterima dari informan, pelaksanaan pemerintahan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik telah diterima masyarakat. Dalam bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdapat 10 pegawai dengan tugas dan peran masing-masing. Berikut adalah pegawai yang terdapat pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 2. Pegawai Bidang Pengolahan Dan Informasi Publik

No	Nama	Jabatan
1.	Suharti, S.E	Pengelola Data
2.	Dewi Zumrotus S	Pengelola Data
3.	Riska Widya Septianingrum, S. Ikom	Pengelola Data
4.	Alikasan	Pengelola Data
5.	Pujihartini, S. Sos	Pengelola Kegiatan
6.	Arif Budianto, S.T	Penyusun Berita Dan Pendapat Umum
7.	Isnawati, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat
8.	Sriani, S.S	Pranata Hubungan Masyarakat
9.	Dinda Bestari Martaningrum, S.S	Pranata Hubungan Masyarakat
10.	Eni Sri Widyaningsih, S. Sos	Pranata Hubungan Masyarakat
11.	Anita Yudi Jayanti, S. Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Tabel 3. Sumber Daya Infrastruktur Pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Sarana Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
Laptop	2	Asus dan Accer
Printer	3	Epson LX 300, Hp Leser Jet, Epson L200
Komputer Layar dan CPU	4	HP, LG dan Samsung
Handycam Sony HXR	1	NX 100 FULL

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Disposisi**

Disposisi atau kecenderungan tingkah laku pihak yang terlibat dalam suatu program sangat menentukan keberhasilan program. Pihak yang terkait dengan program keterbukaan informasi publik cenderung mempunyai sikap yang baik dalam menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan program yang dilaksanakan. Menurut peneliti, adanya SOP bagi dinas tapi belum digunakan secara menyeluruh, menimbulkan belum adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan Informasi Publik.

Menurut hasil wawancara, dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai data-data yang kurang memadai. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan pembangunan yang belum terlaksana belum dapat ditanggapi dengan cara dikerjakan. Menurut hasil peneliti bisa bisa menyimpulkan Variabel yang paling berpengaruh adalah komunikasi dibanding variabel sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hal ini disebabkan komunikasi merupakan jembatan antara pemerintahan dengan masyarakat. Informasi yang sudah tersedia di Dinas Kominfo tidak dapat diterima masyarakat jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Struktur Birokrasi

Teori Edwardian ialah aspek keempat implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini sebenarnya meliputi dua aspek penting, yaitu mekanisme pelaksana atau standard operating procedure (SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja [14]. Struktur birokrasi akan cukup baik apabila pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikut serta ke lapangan memantau pelaksanaan program. Pihak yang terkait dengan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Program Informasi dan Komunikasi Publik, pembagian tugas dan wewenang serta ketepatan atau kesesuaian pelaksana implementasi informasi dan komunikasi publik.

Tabel 4. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat DISKOMINFO Sidoarjo

Urutan	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pertama	Pengguna layanan (pengadu) menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media aduan yang telah disediakan.
Kedua	Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait materi aduan.
Ketiga	Pengguna layanan akan menerima surat/ konfirmasi atas pengaduannya. Surat berisikan jawaban atas pengaduan, detail waktu dan metode penanganan pengaduan yang dikirim kepada kontak yang di cantumkan dalam aduan.

KESIMPULAN

Berdasarkan indikator pada pengukuran Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Komunikasi, komunikasi memainkan peran krusial untuk memastikan pemahaman yang tepat dan sinergi antara pihak terkait. Keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada efektivitas komunikasi, baik secara internal antara penyelenggara kebijakan maupun eksternal dengan masyarakat. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik menjadi elemen kunci, namun tantangan terkait akses internet di beberapa daerah perlu diatasi. Pentingnya sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh instansi terkait, seperti Kominfo, tidak dapat diabaikan agar informasi yang disampaikan dapat lebih merata dan menyeluruh. Dengan demikian, perlu adanya upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik guna mendukung implementasi kebijakan secara efektif dan inklusif.

Sumber Daya, masalah sumber daya menjadi faktor kritis yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Meskipun pelaksanaan pemerintahan di Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo diakui sesuai dengan kepentingan publik dan memberikan dampak positif secara fisik, penyelewengan dana menjadi kendala serius. Penyalahgunaan dana tersebut mengakibatkan ketidakefektifan pelayanan publik dan merugikan kepentingan umum. Meskipun Dinas Kominfo merespons keluhan masyarakat terkait kelengkapan data laporan keuangan, keterbatasan sumber daya dana menjadi hambatan dalam merespons secara optimal. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Disposisi, disposisi atau kecenderungan tingkah laku pihak terlibat menjadi faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan. Meskipun pihak terkait menunjukkan sikap positif dalam menyikapi keluhan masyarakat, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya terimplementasi mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang efektif dalam implementasi program Keterbukaan Informasi Publik memerlukan keterlibatan aktif pihak terkait, termasuk Bupati Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Bidang Program Informasi dan Komunikasi Publik. Meskipun fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian informasi dianggap baik, terdapat kekurangan dalam kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi kebijakan di Dinas Kominfo. Hal ini dapat membingungkan implementor dalam bertindak, menandakan perlunya peningkatan dalam penyusunan panduan operasional yang lebih tegas.

